

Pergeseran Kebijakan Strategis AS-Tiongkok: Transisi kekuasaan Era Biden ke Trump 2.0

Larasati

Dosen Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya, Indonesia, larasati@fisip.unsri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis transisi pemerintahan Amerika Serikat dari administrasi Biden menuju Trump 2.0, dengan fokus pada dinamika hubungan AS-Tiongkok dan keberlanjutan kebijakan *America First*. Dengan menggunakan teori *Foreign Policy Change*, studi ini membahas mengenai perubahan paradigma kebijakan luar negeri AS dari kepemimpinan Partai Demokrat di era Biden-Harris menuju pendekatan Partai Republik di bawah Trump, khususnya dalam dimensi kebijakan ekonomi, perdagangan dan keamanan. Mengacu pada model perubahan kebijakan luar negeri dari Charles Hermann dan pendekatan politik birokrasi Graham Allison, penelitian ini mengevaluasi bagaimana transisi administrasi memengaruhi arah hubungan strategis antara dua kekuatan besar dunia tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kembalinya Trump berpotensi memperkuat arah unilateralisme dan rivalitas strategis terhadap Tiongkok, namun sekaligus membuka kemungkinan pembentukan tatanan baru dalam hubungan internasional. Studi ini memberikan kontribusi teoretis dalam kajian perubahan kebijakan luar negeri serta implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan pelaku diplomasi dalam merespons arah kebijakan luar negeri AS pada periode pemerintahan Trump 2.0.

Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri AS, Hubungan AS-Tiongkok, *America First*, Trump 2.0, Rivalitas Strategis

Abstract

This study aims to analyze the transition of the United States government from the Biden administration to Trump 2.0, with a focus on the dynamics of US-China relations and the sustainability of the *America First* policy. Using the *Foreign Policy Change* theory, this study examines the paradigm shift in US foreign policy from the Democratic Party leadership in the Biden-Harris era to the Republican Party approach under Trump, particularly in the areas of economic, trade, and security policies. Drawing on Charles Hermann's foreign policy change model and Graham Allison's bureaucratic politics approach, this study examines how the administration transition influences the direction of strategic relations between the two world powers. The research findings show that Trump's return has the potential to strengthen the direction of unilateralism and strategic rivalry towards China, but at the same time opens up the possibility of forming a new order in international relations. This study provides theoretical contributions to the study of foreign policy change as well as practical implications for policymakers and diplomatic actors in responding to the direction of US foreign policy during the Trump 2.0 administration.

Keywords: US Foreign Policy, US-China Relations, *America First*, Trump 2.0, Strategic Rivalry

Pendahuluan

Hubungan antara dua negara dengan pengaruh besar seperti Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok saat ini menjadi salah satu kiblat arah perkembangan hubungan internasional yang membentuk dinamika sistem kontemporer di dunia yang semakin multipolar dan sarat akan rivalitas geopolitik. Sejalan dengan hal ini, maka penting untuk menelaah lebih jauh mengenai transisi kekuasaan dari pemerintahan Presiden Joe Biden ke Donald J. Trump yang saat ini menjabat sebagai presiden ke-47 AS. Di mana hal ini, juga menjadi momen penting yang berpotensi memicu

pergeseran signifikan khususnya dalam arah kebijakan luar negeri AS terhadap Tiongkok. Kemenangan Trump pada pemilu 2024 lalu, dengan perolehan 312 electoral votes dan memenangkan wilayah di negara-negara bagian kunci seperti Georgia, Pennsylvania dan Wisconsin. Selain membuka jalan bagi kemenangan kedua kalinya Partai Republik ke Gedung Putih, kemenangan ini juga menandai kembalinya *'Make America Great Again'* ala Trump yang terkenal pada periode pertama dan juga *America First* sebagai panduan utama arah kebijakan luar negeri AS (*The New York Times*, 2024). Transisi kekuasaan ini dilihat berdasarkan keberlanjutan dalam konteks hubungan bilateral AS-Tiongkok yang semakin kompleks dengan kembalinya Trump pada kursi pemerintahan. Tulisan ini memusatkan tiga bidang strategis yaitu, ekonomi, perdagangan dan keamanan dalam menelaah lebih jauh mengenai hubungan strategis AS-Tiongkok. Pada bidang ekonomi, terdapat potensi meningkatnya saling ketergantungan ekonomi antara dua kekuatan besar ini atau yang kerap disebut sebagai bentuk *competitive interdependence*, di mana hubungan ekonomi tetap berlangsung, namun dibayangi oleh kecurigaan strategis (Hass, 2021). Dalam bidang perdagangan, pada periode pertama menjabat, Trump mewarisi era pemerintahan sebelumnya yang dikenal dengan *trade war* atau perang tariff yang dimulai sejak 2018 dan secara drastis mengubah lanskap perdagangan global. Sementara itu, dalam bidang keamanan membahas mengenai kawasan Indo-Pasifik yang menjadi arena kontestasi militer, diplomasi dan teknologi antara Washington dan Beijing.

Urgensi dari penelitian ini bertumpu pada dua aspek penting yaitu pertama, kajian akademik yang menganalisis secara sistematis masa transisi kekuasaan dari Biden ke Trump 2.0 dalam bingkai hubungan AS-Tiongkok setelah 2024, yang masih belum banyak dibahas. Sebagian besar literatur sebelumnya lebih banyak membahas mengenai kebijakan luar negeri AS era Trump selama periode 2017–2021 atau memberikan studi perbandingan melalui pendekatan multilateral pada masa pemerintahan Biden. Kedua, masih kurang kajian yang secara komprehensif mengaitkan tiga bidang yang menjadi isu-isu strategis seperti ekonomi, perdagangan dan keamanan dalam melihat efek transisional terhadap arah hubungan bilateral AS-Tiongkok pasca pemilu 2024. Pada bidang ekonomi, era Trump 2.0 diproyeksikan akan semakin memperkuat agenda nasionalisme ekonomi. Retorika kampanye dan dokumen resmi kebijakan ekonomi Trump menyuarakan kritik keras terhadap apa yang disebutnya sebagai ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok, terutama dalam sektor manufaktur dan energi (Rappeport & Swanson, 2025).

Dalam pidatonya pada bulan Maret 2025, Trump menyatakan bahwa "*era deindustrialisasi AS akibat globalisasi yang dipimpin Tiongkok harus diakhiri.*" Sebagai langkah nyata, pemerintahannya mengumumkan insentif besar-besaran bagi perusahaan AS yang melakukan *reshoring* produksi dari Tiongkok ke wilayah domestik AS, termasuk melalui potongan pajak dan pembiayaan infrastruktur energi (*The White House*, 2025). Namun demikian, strategi ini menghadapi tantangan struktural. Menurut laporan dari *US-China Business Council* (2025), nilai investasi langsung AS di Tiongkok pada kuartal pertama 2025 mencapai US\$ 8,6 miliar, yang menunjukkan bahwa meskipun terdapat tekanan politik untuk *decoupling*, realitas pasar tetap mempertahankan keterhubungan ekonomi. Lebih lanjut, sektor teknologi tinggi seperti semikonduktor dan kecerdasan buatan (AI) tetap menjadi pusat yang saling tarik-menarik. Menanggapi hal ini, Pemerintah Trump kembali melarang ekspor chip AI ke Tiongkok dan memperluas daftar entitas perusahaan Tiongkok yang dilarang bertransaksi dengan perusahaan AS (Hawkin & Leonard, 2025).

Pada bidang perdagangan, di era Trump 2.0 pemerintahannya kembali memusatkan kebijakan proteksionisme yang telah menjadi ciri khas pada periode pertamanya. Hal ini terlihat pada April 2025 lalu, pemerintah AS mengumumkan kebijakan tarif impor sebesar 104% terhadap produk manufaktur utama dari Tiongkok, seperti baja, aluminium dan kendaraan Listrik (Huld, 2025). Langkah ini di latar belakang oleh tuduhan bahwa Tiongkok memanipulasi pasar global melalui subsidi besar-besaran dan praktik dumping (Office of the United States Trade Representative, 2025).

Menanggapi kebijakan ini, Tiongkok mengumumkan tarif balasan yang akan menyamakan tarif 50% pada semua impor dari Tiongkok yang diumumkan oleh Presiden Trump (Bradsher, 2025). Peristiwa ini seperti mengawali kembali era perang dagang di antara kedua negara yang baru-baru ini meningkat. Selain itu, dampak dari kebijakan ini semakin meluas, tidak hanya terhadap hubungan bilateral tetapi juga terhadap struktur perdagangan global. Menurut data dari *World Trade Organization* (WTO) pada Mei 2025 menunjukkan bahwa total volume perdagangan global mengalami penurunan sebesar 1,7% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini umumnya, disebabkan oleh eskalasi konflik perdagangan antara AS-Tiongkok (WTO, 2025).

Selain itu, sektor industri di negara-negara Asia Tenggara juga ikut terdampak akibat dari terganggunya rantai pasok regional, terutama dalam produksi elektronik dan otomotif. Berdasarkan riset yang dikeluarkan oleh *McKinsey* (2024) negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia dan Vietnam memimpin pergeseran arus manufaktur dan perdagangan, sebagaimana ditunjukkan oleh metrik konkret seperti FDI dan volume ekspor. Pada tahun 2023, Indonesia menerima sekitar \$33 miliar dalam FDI manufaktur greenfield dan Vietnam sekitar \$16 miliar, sementara ekspor mereka masing-masing mencapai \$290 miliar dan \$440 miliar (*McKinsey*, 2024). Dalam hal ini, Tiongkok diperkirakan akan tetap menjadi pemimpin dalam angka produksi serta membantu mendorong pergeseran produksi di kawasan tersebut karena produsennya semakin banyak memindahkan basis produksi ke wilayah Asia Tenggara. Selain sektor ekonomi di atas, isu keamanan khususnya di kawasan Indo-Pasifik menjadi dimensi isu strategis selanjutnya dalam melihat hubungan AS-Cina. Berdasarkan laporan Pentagon awal 2025, Tiongkok disebutkan memperluas kehadiran militernya di kawasan Laut Cina Selatan dan memperkuat aliansi militernya dengan Rusia dalam latihan militer gabungan yang disebut "*Peace Mission 2025*" (Lee & Blanchard, 2025). Menanggapi hal ini, pemerintahan Trump menyatakan akan memperkuat kehadiran militer AS di kawasan Indo-Pasifik melalui penambahan kapal induk di perairan Pasifik Barat dan peningkatan kerja sama pertahanan dengan Jepang, Filipina, dan Taiwan (May, 2025).

Implikasi dari kebijakan luar negeri AS di masa transisi Trump 2.0 pada isu keamanan sejauh ini memiliki metode atau kecenderungan yang sama khususnya dalam mengelola stabilitas di kawasan Indo-Pasifik terkait aliansinya dengan Taiwan. Dalam hal retorika politik tanggapan administrasi Trump terhadap Taiwan tetap konsisten mengenai dukungan AS terhadap Taiwan. Di sela-sela wawancaranya, Senator Marco Rubio menegaskan bahwa kebijakan AS adalah mempertahankan status quo Taiwan dan menentang segala bentuk perubahan dengan kekuatan atau pemaksaan (Chen & Huang, 2025). Selain itu, terdapat variabel baru yang terjadi dalam hubungan AS-Taiwan saat ini, di mana Taiwan meskipun mitra dekat AS menjadi negara yang tidak terkecuali dalam kebijakan *reciprocal tariff* Trump. Taiwan dikenai tarif tinggi sebesar 32%, Segera setelah pengumuman tariff tersebut, Yuan Eksekutif Taiwan merilis berita yang menggambarkan tarif tinggi tersebut sebagai tidak adil. Menurut statistik perdagangan dari Kementerian Urusan Ekonomi, pada Maret 2025, pasar AS menyumbang sekitar 25,7% dari total ekspor Taiwan, menjadikannya tujuan ekspor terbesar. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan dari sisi Taiwan (Leu, 2025). Sehingga dapat dilihat bahwa sikap transaksional yang diterapkan Trump menimbulkan kebingungan bahkan bagi aliansi dan negara mitra AS itu sendiri.

Dari situasi ini dapat dikatakan bahwa beberapa metode dalam penerapan kebijakan luar negeri Trump periode pertama pemerintahannya tidak akan berubah jauh dengan periode berjalan saat ini. Meskipun tidak menutup kemungkinan adanya perubahan baru yang signifikan terjadi dalam mengelola hubungan AS-Taiwan karena pendekatan hati-hati dan sistematis di era Biden tidak sepenuhnya diadopsi di masa Trump 2.0. Selain hubungan trilateral tersebut, arah pergerakan strategis antara AS-Tiongkok tetap akan memberikan tantangan sendiri bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Sampai saat ini, Trump mengeluarkan berbagai kebijakan kontroversial yang

memicu perhatian dari seluruh penduduk dunia. Di mana baru-baru ini, Trump mengeluarkan kebijakan pemotongan dana hibah universitas dan pelarangan masuknya mahasiswa-mahasiswa internasional di universitas Harvard (Saul, 2025). Sehingga melalui peristiwa ini kebijakan Trump dapat dimaknai tidak hanya mempengaruhi hubungan dengan Tiongkok saja, melainkan juga berdampak pada hubungan lain di mana negara-negara yang banyak mengirimkan mahasiswa internasional seperti India dan negara-negara lain di Asia Tenggara yang ikut terdampak jika kebijakan ini benar-benar diterapkan. Melalui beberapa peristiwa ini, kebijakan trump yang agresif periode ini tidak tentang hubungan AS dengan Tiongkok, melainkan juga negara-negara yang bermitra secara strategis dengan AS. Hal ini mendorong terbentuknya pola baru dalam melihat pendekatan ataupun langkah-langkah strategis dalam kebijakan luar negeri AS di bawah kepemimpinan Trump 2.0.

Melalui pengamatan dari beberapa peristiwa ini, secara teoretis, penelitian ini menggunakan pendekatan *foreign policy change* dengan menitikberatkan pada model politik birokrasi dari Allison (1971). Model ini menekankan bahwa kebijakan luar negeri bukan merupakan hasil keputusan tunggal dari seorang pemimpin, melainkan hasil dari negosiasi dan tarik-menarik antar lembaga birokrasi yang memiliki kepentingan, posisi institusional dan preferensi kebijakan yang berbeda. Dalam hal ini, kebijakan AS terhadap Taiwan dapat dilihat sebagai hasil kompromi antara aktor-aktor seperti Departemen Luar Negeri yang mendorong pendekatan diplomasi hati-hati dan Kantor Perwakilan Dagang atau Departemen Pertahanan yang lebih mendorong postur tegas terhadap Tiongkok. Dengan demikian, perubahan pendekatan terhadap Taiwan bukan sekadar cerminan kehendak politik presiden, melainkan juga sebuah produk dari proses institusional yang kompleks di dalam struktur pemerintahan AS. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji dinamika perubahan kebijakan luar negeri AS terhadap Tiongkok di masa transisi kekuasaan Biden ke Donald Trump yang menekankan pada tiga pilar utama yaitu ekonomi, perdagangan dan keamanan.

Penelitian ini juga melihat komparasi secara garis besar mengenai pendekatan Biden yang lebih multilateral dan berbasis kerja sama institusional, dengan pendekatan konfrontatif dan transaksional ala Trump. Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya memusatkan pada nilai akademis dalam memperkaya diskursus mengenai perubahan kebijakan luar negeri dan rivalitas kekuatan besar, tetapi juga terkait dengan relevansi praktis pada kontribusi yang didapatkan negara-negara di Asia Tenggara dan komunitas internasional untuk memahami arah kebijakan luar negeri AS terhadap Tiongkok ke depan. Saat ini, di tengah beragamnya tensi geopolitik yang mempengaruhi iklim dari perkembangan studi hubungan internasional, transisi Trump 2.0 merupakan momen kritis yang dapat menentukan bagaimana ranah internasional dibentuk setidaknya dalam lima tahun ke depan apakah akan menuju koeksistensi yang kompetitif, atau justru mengarah pada potensi konfrontasi terbuka.

Metode

Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini dipilih karena fokus utama kajian adalah untuk menganalisis secara mendalam dinamika perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dari era pemerintahan Presiden Joe Biden menuju pemerintahan Trump 2.0, khususnya dalam konteks hubungan strategis AS-Tiongkok di bidang ekonomi, perdagangan dan keamanan. Penelitian ini bukan didasarkan pada data primer, melainkan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber penelitian seperti buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga riset kebijakan (*think-tank*), dokumen resmi pemerintahan, serta publikasi media arus utama yang kredibel. Sebagai kajian konseptual, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman teoretis mengenai bagaimana pergantian kepemimpinan politik dapat mempengaruhi arah dan alur kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain. Oleh karena itu, pemilihan teori menjadi

fondasi penting dalam membingkai analisis pada tulisan ini. Melalui lanskap dari teori *foreign policy change* sebagai kerangka utama, kemudian ditelaah lebih jauh melalui model *bureaucratic politics* dari Graham T. Allison.

Melalui *foreign policy change* dari Hermann (1990) yang menawarkan tipologi perubahan kebijakan luar negeri menjadi empat kategori yaitu, *adjustment change*, *program change*, *goal change* dan *problem/target change*. Tipologi ini berguna untuk mengidentifikasi sejauh mana perubahan kepemimpinan dari Biden ke Trump 2.0 menghasilkan reorientasi terhadap kebijakan luar negeri AS. Misalnya, jika perubahan hanya terjadi pada alat kebijakan (seperti tarif), maka ia dikategorikan sebagai *program change*, tetapi jika perubahan menasar pada tujuan strategis utama, maka ia masuk kategori *goal change*. Konteks ini relevan untuk menilai transformasi strategi dari kebijakan luar negeri AS terhadap Tiongkok, di mana Trump yang dikenal dengan pendekatan *America First* yang menolak sistem multilateralisme dan lebih mengutamakan kepentingan nasional secara unilateral (Hermann, 1990). Sementara itu, model *bureaucratic politics* dari Allison (1971) digunakan untuk menelusuri bagaimana dinamika internal antar-lembaga pemerintahan AS seperti Departemen Luar Negeri, Departemen Perdagangan, USTR dan Dewan Keamanan Nasional dapat mempengaruhi formulasi kebijakan luar negeri AS terhadap Tiongkok. Model ini didasarkan pada asumsi bahwa kebijakan luar negeri tidak selalu merupakan hasil keputusan rasional-tunggal, melainkan merupakan hasil kompromi dan negosiasi antara aktor-aktor birokrasi yang memiliki kepentingan dan persepsi yang berbeda.

Seperti dikutip dari Allison (1971) yang menyatakan “*where you stand depends on where you sit*” menjadi kunci dalam menganalisis tarik-ulur institusional yang terjadi dalam proses perumusan kebijakan luar negeri AS, terutama di isu-isu yang melibatkan kepentingan ekonomi dan keamanan secara bersamaan (Blackwill & Campbell, 2016). Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis model interaktif dari Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari empat tahap utama yaitu, pertama pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dan terkini. Kedua, reduksi data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan dan pemfokusan data berdasarkan tema dan variabel yang telah ditentukan. Ketiga, yaitu penyajian data, yaitu mengorganisasi data ke dalam struktur naratif yang logis dan mendukung argumentasi. Terakhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyusun simpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan diuji secara kritis melalui pembacaan literatur tambahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab hipotesis bahwa transisi pemerintahan dari Biden ke Trump 2.0 akan mengarah pada kecenderungan unilateralisme, peningkatan kebijakan proteksionis, serta pembingkai ulang Tiongkok sebagai pesaing strategis, daripada mitra dagang. Agar mendukung argumen ini maka, data yang digunakan mencakup laporan yang tersedia mengenai transisi pemerintahan, dokumen kebijakan perdagangan, pernyataan resmi Gedung Putih, pidato kenegaraan, serta publikasi dari lembaga seperti *Council on Foreign Relations (CFR)*, *Brookings Institution*, dan *Center for Strategic and International Studies (CSIS)*. Pemanfaatan literatur dari lembaga-lembaga ini dimaksudkan untuk memperkuat validitas argumen dan memberikan konteks empiris terhadap fokus dari perubahan yang diamati. Melalui pendekatan ini, artikel ini bertujuan memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai perubahan kebijakan luar negeri AS melalui pendekatan teoritis yang berlapis mulai dari aktor individu (pemimpin), dinamika institusional, hingga respons terhadap perubahan sistemik dalam lingkungan internasional. Dengan demikian, artikel ini menempatkan transisi politik domestik sebagai variabel penting dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat ke depan, khususnya dalam konteks rivalitas strategis dengan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.

Hasil dan Pembahasan

a. *Dinamika Transisi Kepresidenan Amerika Serikat dan Implikasinya terhadap Kebijakan Luar Negeri*

Transisi kepresidenan di Amerika Serikat merupakan periode kritis yang secara signifikan mempengaruhi arah dan implementasi kebijakan nasional, termasuk kebijakan luar negeri. Proses ini tidak hanya sekadar peralihan administratif, tetapi juga merupakan arena pertarungan politik dan legal yang strategis, yang berpotensi mengubah dasar kebijakan yang sudah ada sebelumnya maupun menginisiasi kebijakan baru. Salah satu instrumen kunci yang berperan dalam masa transisi adalah *Congressional Review Act* (CRA), yang memberi Kongres kekuatan untuk menolak regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh lembaga eksekutif dalam waktu tertentu (Carey et al., 2016). Dengan adanya CRA, dapat memberikan jalur cepat bagi legislator untuk membatalkan kebijakan yang tidak sesuai dengan agenda pemerintahan baru, terutama dalam konteks pergantian partai penguasa (Brannon et al., 2024). Pada masa pemerintahan Trump periode pertama, CRA digunakan secara masif untuk menderegulasi kebijakan era Obama, dengan 16 regulasi penting yang dibatalkan (Shay, 2024). Tren ini diprediksi akan berulang di masa transisi 2024–2025 pemerintahan Trump 2.0, yang mana dari awal Trump menegaskan akan membalikkan berbagai kebijakan Biden yang dianggap tidak selaras dengan agenda proteksionis dan nasionalisnya. Namun yang berbeda kali ini, bahwa setelah 100 hari masa kepemimpinannya pada 29 April 2025, sejauh ini anggota Kongres ke-119 mengajukan 77 resolusi penolakan yang menargetkan 45 peraturan unik yang dikeluarkan selama beberapa bulan terakhir pemerintahan Biden. Sejauh ini, hanya tiga dari resolusi tersebut yang menjadi undang-undang, dengan enam lainnya menunggu tanda tangan presiden. Sampai pada masa awal pemerintahan Trump pertama, Kongres ke-115 mengajukan 63 resolusi penolakan, 14 di antaranya telah ditandatangani menjadi undang-undang (Act, 2025).

Laporan terbaru dari Brookings Institution (2024) dan Council on Foreign Relations (2025) menegaskan bahwa pemanfaatan CRA bukan hanya soal deregulasi administratif, tetapi merupakan bagian integral dari strategi perubahan kebijakan ekonomi dan perdagangan yang lebih tegas, terutama terkait kebijakan tarif impor dari Tiongkok. Dalam konteks hubungan strategis yang semakin kompetitif, kenaikan tarif impor hingga 60% pada barang-barang dari Tiongkok bukan hanya langkah ekonomi, melainkan sinyal politik yang mengindikasikan eskalasi rivalitas politik (U.S. Budget Watch, 2024). Walaupun secara formal presiden terpilih berhak mengajukan kebijakan baru, periode transisi menghadirkan sejumlah keterbatasan yang kompleks. Dikutip dari *Center for Presidential Transition* (2023) yang mengidentifikasi tiga kendala utama dalam efektivitas presiden baru selama masa transisi pertama, dalam hal informasi kendala dalam upaya *Receiving* atau menerima, meninjau dan menindaklanjuti informasi dari pemerintahan sebelumnya untuk menjalankan operasi yang ada dan mulai memberlakukan tujuan kebijakan baru. Kemudian, kedua proses *decision-making* dalam mempersiapkan eskalasi ancaman yang diketahui dan tidak dapat diprediksi serta menanggapi tantangan yang tidak terduga. Terakhir, yaitu kemampuan dalam memimpin yang dapat mengisi posisi kepemimpinan utama di tengah tantangan dan penundaan proses konfirmasi Senat. Dalam skenario terbaik, presiden baru mengambil alih komando dengan tim lengkap pemimpin keamanan nasional (Blachman, et al, 2023). Studi dari *American Political Science Review* (2023) mendukung temuan ini, menyatakan bahwa masa transisi kerap menjadi periode “kekosongan kekuasaan” (power vacuum) yang dapat dimanfaatkan oleh aktor domestik maupun asing untuk mengintervensi atau menghambat proses realisasi dari agenda baru.

Di masa transisi 2024-2025, situasi ini semakin rumit karena ketegangan politik domestik yang tinggi dan kompetisi antar lembaga pemerintah, yang menyebabkan tumpang tindih dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Sebagaimana diamati oleh *Center for Presidential Transition* (2023), ketegangan antara administrasi Biden yang mandatnya semakin melemah dan pemerintahan Trump 2.0 yang belum memiliki kewenangan konstitusional

penyempitan berpotensi memperlambat respon efektif terhadap tantangan internasional, terutama di kawasan Asia yang sangat dinamis. Selain faktor kelembagaan, dinamika politik domestik mempengaruhi kebijakan luar negeri selama masa transisi. Menurut laporan dari *Pew Research Center* (2024) mengungkapkan adanya fragmentasi dalam basis dukungan Partai Republik yang terbagi antara fokus strategis di Timur Tengah dan kawasan Asia-Pasifik. Perbedaan ini mencerminkan dilema kebijakan luar negeri yang harus dihadapi pemerintahan baru tentang bagaimana menyeimbangkan kepentingan geopolitik yang beragam di berbagai kawasan. Konsekuensinya, kebijakan luar negeri AS setelah transisi diperkirakan akan menunjukkan kompromi dan adaptasi, bukan hanya antara kepentingan nasional dan internasional, tetapi juga antara faksi-faksi politik domestik (Dimock, Michael; Kiley, Jocelyn; Keeler, Scott; Doherty, 2014).

Di sisi lain, penelitian oleh *Carnegie Endowment for International Peace* (2025) menunjukkan bahwa konflik kepentingan ini menyebabkan dinamika birokrasi yang kompleks, di mana interaksi antar lembaga pemerintah dan Kongres memiliki pengaruh dalam menentukan batas-batas dan arah kebijakan luar negeri yang dapat diambil. Pengalaman transisi Trump pada 2017 yang dinilai kurang maksimal menjadi pelajaran penting dalam mengelola pemerintahan pada periode transisi 2024-2025. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh *Carnegie Endowment* (2025), tim transisi Trump 2.0 lebih mempersiapkan diri dengan strategi koordinasi yang lebih baik antar lembaga dan peningkatan perencanaan kebijakan yang matang (*Carnegie Endowment*, 2025). Hal ini menunjukkan peningkatan profesionalisme dan kesadaran bahwa masa transisi bukan hanya soal pergantian orang, tetapi juga pengelolaan kebijakan dan stabilitas politik secara menyeluruh. Strategi ini diharapkan mampu mengurangi risiko kekosongan kekuasaan dan memaksimalkan pemanfaatan kewenangan presiden selama periode transisi, sehingga agenda kebijakan baru dapat segera diimplementasikan dan konflik internal dapat diminimalkan. Fenomena ini juga bisa dianalisis melalui lensa teori *bureaucratic politics* Allison (1971), yang menyatakan bahwa kebijakan adalah hasil kompromi dan negosiasi antar aktor birokrasi yang memiliki kepentingan dan posisi berbeda dalam sistem pemerintahan.

Pada masa transisi ini, Tulisan ini memusatkan penelitian pada bagaimana dinamika kekuasaan antar Lembaga, misalnya seperti antara Departemen Perdagangan, Departemen Luar Negeri, dan Kongres memiliki peran dalam menentukan pilihan kebijakan yang akhirnya diambil. Selain itu, teori *foreign policy change* yang dikemukakan Hermann (1990) membantu tulisan ini dalam menjelaskan tingkat-tingkat dari perubahan kebijakan yang terjadi, mulai dari penyesuaian minor hingga perubahan mendasar dalam tujuan kebijakan luar negeri AS. Dalam konteks masa transisi 2024-2025, kebijakan proteksionisme ekonomi Trump 2.0 merupakan contoh dari adanya perubahan programatik dan tujuan, yang mencerminkan pergeseran fundamental dari globalisme ekonomi era Biden menuju pendekatan nasionalis yang lebih konfrontatif.

b. Perubahan Paradigma Kebijakan AS terhadap Tiongkok

Transisi dari pemerintahan Biden ke Trump 2.0 pada 2025 diprediksi akan membawa perubahan signifikan dalam arah kebijakan luar negeri AS terhadap Tiongkok. Selama periode pertama pemerintahan Trump, kebijakan AS-Tiongkok didominasi oleh proteksionisme ekonomi yang ketat melalui kebijakan tarif, hal ini ditandai dengan terjadinya peristiwa perang dagang atau *trade war* (Boylan et al., 2021). Di mana, saat itu AS menerapkan langkah-langkah ekonomi agresif melalui kebijakan tarif impor tinggi, pembatasan teknologi dan pembatasan investasi asing. Pada 6 Juli 2018, menandai dimulainya perang dagang secara resmi, saat itu AS mengenakan tarif sebesar 25% terhadap impor Tiongkok senilai \$34 miliar. Kebijakan ini di latar belakang oleh adanya produk tertentu yang menjadi sasaran yang sebagian besar berkaitan dengan strategi Tiongkok dikenal dengan *'Made in China 2025'* yang bertujuan untuk mendorong industri maju seperti robotika,

kedirgantaraan, dan elektronik (Jarmuth, 2018). Sebagian besar barang konsumsi pasar massal seperti ponsel, laptop, pakaian dan mainan sengaja tidak dikenakan tarif. Pada tahap kedua tariff Amerika menargetkan impor Tiongkok bernilai \$16 miliar, yang kemudian menyusul pada bulan Agustus (Teekah, 2025). Kebijakan ini menempatkan Tiongkok bukan hanya sebagai pesaing ekonomi utama, tetapi juga sebagai potensi ancaman strategis yang perlu dibendung. Hal ini dipertegas oleh Trump melalui narasi “*strategic competitor*” sebagaimana dirumuskan dalam *National Security Strategy* tahun 2020, yang menekankan pentingnya mempertahankan kedaulatan ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan pada rantai pasok global yang didominasi Tiongkok (EUA, 2020).

Sedangkan presiden pendahulunya, yaitu Biden mengadopsi pendekatan yang cenderung lebih seimbang dan multifaset. Meski tetap mempertahankan pendekatan kompetisi strategis di bidang teknologi dan perdagangan. Pemerintahan Biden memberikan perhatian lebih pada aspek kerja sama multilateral dalam isu-isu global seperti perubahan iklim dan kesehatan internasional (Kurt Campbell & Jake Sullivan, 2019). Pendekatan ini dikenal dengan istilah *managed competition* atau persaingan yang terkendali, dengan berusaha menyeimbangkan tekanan dengan diplomasi dan kolaborasi terbatas. Sehingga dengan kembalinya Trump dalam kursi kepresidenan diperkirakan akan mengembalikan kebijakan unilateral dan proteksionisnya yang lebih keras. Selain kebijakan proteksionis tersebut, salah satu alat yang digunakan Trump dalam menentukan kebijakan luar negerinya adalah melalui pemanfaatan *Congressional Review Act* (CRA) untuk membatalkan kebijakan Biden yang dianggap terlalu lunak terhadap Tiongkok, termasuk kebijakan terkait perdagangan dan teknologi (Kane, Schrag & Patnaik, 2025). Sedangkan kebijakan *economy decoupling* diterapkan melalui upaya mengurangi keterlibatan atau ketergantungan dalam hubungan ekonomi antara AS-Tiongkok pada masa transisi ini akan semakin dipusatkan. Misalnya dalam kebijakan ekonominya saat ini Trump meningkatkan tarif impor, pembatasan ekspor teknologi seperti semikonduktor, telekomunikasi 5G, kecerdasan buatan (AI) dan kontrol ketat atas investasi asing dalam sektor-sektor strategis (*Council on Foreign Relations*, 2025). Kebijakan ini bertujuan menahan laju kemajuan teknologi Tiongkok dan menjaga keunggulan teknologi AS di panggung global.

Dikutip dari Batemann, bahwa langkah ini juga mencerminkan kekhawatiran AS mengenai keamanan nasional, karena teknologi seperti AI dan 5G memiliki implikasi militer dan intelijen yang signifikan (Lu & Zhang, 2021). Pemisahan atau *technology decoupling* ini bukan hanya dalam aspek ekonomi, tapi juga sebagai strategi untuk membatasi kapasitas Tiongkok dalam membangun kekuatan militer dan pengaruh global yang akan menyaingi atau menggantikan AS. Dengan menggunakan model Charles Hermann tentang perubahan kebijakan luar negeri, peralihan dari pendekatan Biden ke Trump 2.0 dapat dilihat adanya perubahan programatik dan tujuan (Hermann, 1990). Pada periode Trump 2.0, administrasinya tidak hanya melakukan penyesuaian kebijakan minor, namun menggeser prioritas strategis AS dari kerja sama era Biden menuju penekanan pada pemisahan ekonomi yang lebih agresif dari sebelumnya, terutama dalam ranah teknologi dan perdagangan. Sementara itu, model *bureaucratic politics* dari Graham Allison (1971) memberikan kerangka pemikiran terstruktur dalam memahami dinamika internal pemerintah AS selama periode masa transisi ini. Di bawah pemerintahan Trump 2.0, Departemen Perdagangan dan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) diperkirakan akan mendapatkan pengaruh yang lebih besar, semakin menggalakkan langkah proteksionisme dan sikap asertif terhadap Tiongkok. Sebaliknya, Departemen Luar Negeri yang biasanya mendorong diplomasi mungkin mengalami marginalisasi, sehingga melahirkan kebijakan yang lebih konfrontatif dan kurang diplomatis dibanding pemerintahan Biden. Misalnya mengenai kekhawatiran pelemahan aliansi yang akan kembali dilanda

oleh negara-negara mitra AS, karena sikap Trump yang lebih mengutamakan keuntungan domestik AS di atas apapun (Lindsay, 2025).

Maka tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu aspek penting yang menarik untuk diamati dari pemerintahan Trump 2.0 adalah bagaimana langkah administrasinya dalam upaya penguatan aliansi dengan negara-negara mitra di kawasan Indo-Pasifik, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Sebelumnya di era Biden, kerja sama minilateral semacam ini dibentuk melalui aliansi seperti QUAD dan AUKUS menjadi poros utama bagi AS dalam membendung pengaruh Tiongkok di kawasan tersebut (Teo, 2024). Langkah ini konsisten dengan strategi kontainment modern, yang memanfaatkan kemitraan keamanan dan ekonomi untuk menciptakan keseimbangan kekuatan regional. Menurut laporan dari *International Centre for Defence and Security* (2024) penguatan aliansi ini mencakup adanya upaya peningkatan latihan militer bersama, dukungan terhadap inisiatif keamanan maritim, dan kerja sama teknologi tinggi di bidang keamanan siber dan intelijen (Cornelis & Matsuda, 2024). Jika Trump menggunakan pendekatan yang sama maka hal ini menandakan adanya pergeseran dari pendekatan multilateral yang hati-hati ke arah pendekatan yang konfrontatif dan terkoordinasi secara strategis.

Meskipun pada kenyataannya kebijakan Trump 2.0 menawarkan pendekatan yang tegas terhadap Tiongkok, sejumlah analis mengingatkan bahwa eskalasi persaingan dapat membawa risiko destabilitas regional dan global. Selain itu, studi yang dilakukan oleh *Council on Foreign Relations* (2025) juga mengingatkan mengenai potensi kebijakan proteksionis dan militerisasi kawasan yang dapat memicu konflik terbuka dan memperburuk hubungan diplomatik, termasuk dengan sekutu tradisional AS yang mungkin lebih mengutamakan stabilitas dan dialog (Liu, Tobin & Waterman, 2025). Selain itu, pendekatan ini berpotensi mempercepat potensi terjadinya perlombaan teknologi yang berisiko memicu fragmentasi global dalam inovasi teknologi dan standar perdagangan internasional. Oleh karena itu, beberapa ahli akademis dan praktisi menganjurkan agar kebijakan AS tetap memasukkan elemen dialog terbuka dan mekanisme pengelolaan risiko, meskipun menggunakan sikap tegas terhadap Tiongkok (Chivvis, 2024). Perubahan ini tampak dari adanya ruang dialog diberikan oleh Trump melalui himbauan dari administrasinya kepada negara-negara yang terdampak oleh *reciprocal tariff* untuk menegosiasikan kembali trade deal yang ideal bagi mereka.

c. Warisan dan Dampak Kebijakan *America First* Era Trump

Kebijakan *America First* yang diperkenalkan oleh Trump pada periode pertamanya 2017–2021 meninggalkan warisan yang kompleks bagi kebijakan luar negeri AS, terutama dalam mengelola hubungan dengan Tiongkok. Kebijakan ini memberikan penekanan pada isu-isu prioritas nasionalisme ekonomi dan kedaulatan politik dengan cara mengutamakan kepentingan domestik AS dan meminimalkan keterlibatan multilateral (Belhaj, 2024). Pendekatan ini mendorong kebijakan proteksionis, termasuk perang dagang dengan Tiongkok, pengetatan kontrol ekspor teknologi, serta penguatan aliansi strategis di kawasan Indo-Pasifik untuk menghadapi pengaruh Tiongkok (Lu & Zhang, 2021). Meskipun kebijakan ini memiliki keuntungan tertentu, seperti menggerakkan industri domestik dan memperkuat posisi tawar AS di arena global, *America First* juga menyebabkan ketegangan diplomatik yang signifikan dan melemahkan kerjasama internasional yang sebelumnya dibangun (Campbell & Sullivan, 2019). Misalnya, kebijakan ini menyebabkan friksi dengan sekutu tradisional AS di Eropa dan Asia, serta memperumit upaya kolektif dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan pandemi COVID-19 (Ikenberry, 2021).

Sedangkan pemerintahan Biden, ketika mulai memimpin pada 2021 lalu jajaran kabinetnya membantu dengan mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang dalam menghadapi Tiongkok. Meskipun masih dengan intonasi yang mempertahankan mengenai posisi Tiongkok sebagai pesaing

strategis utama AS. Namun di sisi lain, Biden berusaha menjaga kerja sama dalam isu-isu global seperti perubahan iklim dan kesehatan (Campbell & Sullivan, 2019). Selain itu, pemerintahan Biden juga memberikan perhatian lebih mengenai penguatan dan pentingnya aliansi tradisional dan institusi multilateral sebagai pilar utama kebijakan luar negeri AS yang berlandaskan international rules-based order (Patrick, 2023). Namun, sejumlah kebijakan proteksionis era Trump masih dipertahankan, terutama dalam bidang teknologi tinggi, seperti pengendalian ekspor semikonduktor dan sensor canggih. Ini menunjukkan kesinambungan yang signifikan dalam strategi persaingan teknologi dengan Tiongkok, meskipun dengan pendekatan yang lebih diplomatis dan berorientasi kolaborasi multilateral (Lu & Zhang, 2021).

Dengan kembalinya Trump ke Gedung Putih pada 2025, diperkirakan kebijakan America First akan kembali diutamakan dengan intensitas yang lebih tinggi. Kebijakan ini diperkirakan akan fokus pada peningkatan proteksionisme ekonomi, penguatan kebijakan tarif, serta pembatasan lebih ketat terhadap investasi dan transfer teknologi ke Tiongkok (Goldmacher, Haberman, & Swan, 2024). Selain itu, Trump 2.0 kemungkinan akan mengintensifkan upaya memperkuat kemitraan strategis di kawasan Indo-Pasifik, sebagai bagian dari upaya penyeimbangan kekuatan regional terhadap Tiongkok. Langkah ini akan mencakup peningkatan kerja sama militer, teknologi pertahanan, serta diplomasi keamanan dengan negara-negara seperti Jepang, Australia, dan India dalam format QUAD (Blackwill & Campbell, 2021; Lowy Institute, 2024). Kebijakan ini tidak hanya akan menguatkan dimensi ekonomi dan keamanan, tetapi juga akan menegaskan kembali posisi AS sebagai aktor global yang menolak dominasi Tiongkok dalam tatanan dunia baru yang sedang berkembang. Namun, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan tantangan, seperti meningkatnya ketegangan geopolitik dan risiko eskalasi konflik terbuka (Council on Foreign Relations, 2025).

Perubahan kebijakan dari Biden ke Trump 2.0 yang dianalisis melalui lensa Foreign Policy Change oleh Charles Hermann (1990) menunjukkan adanya perubahan programatik atau *policy adjustment*, namun terindikasi adanya pergeseran tujuan strategis secara fundamental, yakni dari kebijakan persaingan yang terkelola menjadi persaingan yang lebih asertif dan unilateral. Metode dari Graham Allison (1971), mengenai model politik birokrasi menjadi relevan dalam memahami dinamika internal kebijakan tersebut. Di era Trump 2.0, pengaruh dari kelembagaan ekonomi dan perdagangan diperkirakan akan meningkat seiring dengan kebijakan tariff yang secara masif diterapkan oleh Trump. Sementara itu, lembaga diplomasi memiliki tekanan untuk mengikuti agenda proteksionis dan asertif ini. Hal ini memberikan gambaran bagaimana struktur birokrasi dan kepentingan institusional membentuk suatu arah kebijakan luar negeri (Jones, 2010).

Seperti halnya periode pertama, kebijakan America First yang diperkuat di era Trump 2.0 akan memiliki implikasi secara meluas. Selain berpengaruh dalam membentuk tatanan hubungan bilateral AS-Tiongkok, juga pada tata kelola ekonomi global dan stabilitas regional. Sistem perdagangan melalui kebijakan proteksionis dan *technology decoupling* ini dapat mempercepat fragmentasi ekonomi dan teknologi global, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam rantai pasok dan inovasi global (Lu & Zhang, 2021). Di sisi lain, penguatan aliansi strategis di Indo-Pasifik dapat memperkokoh keamanan regional dan mengimbangi ambisi Tiongkok, namun di waktu bersamaan juga menambah kompleksitas geopolitik yang harus dikelola dengan cermat (Johnstone, 2024). Selain itu, pergeseran kebijakan ini memerlukan adanya sikap adaptasi dari aktor domestik dan internasional dalam mengantisipasi ketidakpastian dan potensi konflik yang meningkat di masa depan.

Aspek	Biden (Multilateralisme)	Trump 2.0 (Unilateralisme)
Paradigma Umum	Kooperatif, diplomatik, berbasis institusi multilateral	Transaksional, konfrontatif, nasionalisme ekonomi.
Kebijakan Ekonomi	Mendorong keterlibatan ekonomi global, reformasi rantai pasok bersama	Reshoring, subsidi industri domestik, pemutusan keterkaitan ekonomi dengan Tiongkok
Perdagangan	Managed competition, kontrol selektif terhadap teknologi strategis	Tarif tinggi (104% untuk baja, mobil listrik, dll), perang dagang baru
Aliansi Global	Menguatkan aliansi tradisional dan minilateral (AUKUS, QUAD)	Mengutamakan kepentingan AS, bahkan menarget sekutu tarif
Isu Keamanan	Pendekatan stabilisasi kawasan Indo-Pasifik, dialog diplomatik, status quo Taiwan	Pengerahan militer AS di Laut Cina Selatan, dukungan vokal ke Taiwan disertai tekanan tarif
Institusi Multilateral	Pendukung kuat tatanan rules-based order, aktif di forum global (G7, WHO, dll.)	Skeptis terhadap lembaga multilateral, cenderung bypass melalui kebijakan unilateral
Hubungan dengan Tiongkok	Kompetisi strategis dengan ruang kerja sama (climate, health)	Pelabelan Tiongkok sebagai "strategic threat"; kebijakan technology decoupling
Perubahan Strategi	Penyesuaian kebijakan bertahap (adjustment/change via diplomacy)	Perubahan drastis arah kebijakan (goal/program change)
Pendekatan Birokratis	Keseimbangan antar lembaga (State Dept, DoD, NSC)	Dominasi lembaga ekonomi dan perdagangan (USTR, Dept. of Commerce)
Implikasi Global	Stabilitas sistemik, peluang kerja sama lintas negara	Ketegangan regional, fragmentasi global, risiko eskalasi konflik

Grafik 1.1 Perbandingan Kebijakan Biden vs Trump

Sumber: Diolah dari Hermann (1990), Allison (1971), CFR (2025), Brookings (2024)

Secara umum, Tabel diatas merangkum perbedaan mencolok antara pendekatan kebijakan luar negeri Presiden Biden dan Trump. Biden mengusung multilateralisme yang kooperatif, mendukung stabilitas global melalui aliansi, forum multilateral, dan pendekatan diplomatik terhadap isu strategis seperti perdagangan dan keamanan Indo-Pasifik. Sebaliknya, Trump mengedepankan unilateralisme dengan fokus pada kepentingan nasional AS, pendekatan konfrontatif terhadap Tiongkok, serta skeptisisme terhadap lembaga internasional. Pendekatan Biden berpotensi menciptakan peluang kerja sama lintas negara dan tatanan global yang stabil, sementara pendekatan Trump cenderung memicu ketegangan regional, fragmentasi global, dan eskalasi konflik.

Kesimpulan

Transisi kekuasaan dari pemerintahan Joe Biden ke Donald J. Trump pada tahun 2025 mencerminkan pergeseran signifikan dalam paradigma kebijakan luar negeri Amerika Serikat, khususnya dalam melihat hubungannya dengan Tiongkok. Dengan pendekatan *America First* yang kembali mendominasi, kebijakan luar negeri AS di bawah Trump 2.0 mengarah pada unilateralisme, proteksionisme ekonomi, serta potensi peningkatan rivalitas strategis yang asertif. Pendekatan ini mencerminkan perubahan programatik sekaligus perubahan tujuan strategis sebagaimana dianalisis melalui model perubahan kebijakan luar negeri Hermann (1990). Di sisi lain, pendekatan

bureaucratic politics dari Allison (1971) membantu menjelaskan bagaimana tarik-menarik kepentingan antar lembaga negara, terutama antara lembaga diplomatik dan ekonomi, membentuk hasil kebijakan yang cenderung konfrontatif terhadap Tiongkok.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tiga pilar utama hubungan AS-Tiongkok pada bidang-bidang strategis seperti ekonomi, perdagangan dan keamanan. Kebijakan Trump 2.0 menunjukkan kesinambungan sekaligus eskalasi dari periode sebelumnya. Di sektor ekonomi, kampanye reshoring industri dan kebijakan fiskal nasionalis menandai upaya sistematis untuk memotong ketergantungan terhadap Tiongkok. Dalam perdagangan, kebijakan tarif tinggi yang berbasis pada tuduhan praktik pasar tidak adil mencerminkan intensifikasi dari arsitektur perang dagang. Sementara dalam isu keamanan, terutama di Indo-Pasifik dan Selat Taiwan, retorika asertif serta pengerahan kekuatan militer menunjukkan keberlanjutan strategis dari kebijakan AS dalam mengelola hubungannya dengan Taiwan. Temuan penting dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa arah hubungan AS-Tiongkok setelah berakhir periode Biden di tahun 2024, semakin didominasi oleh kompetisi strategis terbuka dengan intensitas yang meningkat. Meskipun terdapat peluang kerja sama terbatas dalam isu-isu global, kecenderungan kebijakan luar negeri AS di bawah Trump 2.0 masih langkah yang sulit untuk diterapkan karena bertentangan dengan prinsip dari *America First* meskipun masih terbuka ruang upaya penyeimbangan dalam menanggapi pengaruh kebangkitan Tiongkok. Namun, kebijakan ini juga berisiko mempercepat polarisasi kawasan dan menimbulkan ketidakstabilan, khususnya di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan.

Secara teoretis, artikel ini memperkaya kajian perubahan kebijakan luar negeri dengan menggabungkan analisis institusional dan tarik-menarik birokrasi dalam konteks transisi kekuasaan. Secara praktis, hasil penelitian ini relevan bagi pembuat kebijakan dan pelaku diplomasi di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara dalam merespons dinamika baru dalam hubungan kekuatan besar. Dalam lanskap geopolitik yang semakin kompetitif dan volatil, memahami arah kebijakan luar negeri AS menjadi krusial dalam membentuk strategi kebijakan luar negeri nasional masing-masing negara. Dengan demikian, transisi kekuasaan ke Trump 2.0 bukan sekadar rotasi politik, melainkan penanda pergeseran strategis yang dapat menentukan arsitektur keamanan dan ekonomi internasional dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan antara koeksistensi kompetitif atau konfrontasi terbuka.

Daftar Pustaka

Atanassova-Cornelis, E., Matsuda, T., Gaens, B., & Loorents, N. (2024). *Japan, NATO, and the Diversification of Security Partnerships*. International Centre for Defence and Security. https://icds.ee/wp-content/uploads/dlm_uploads/2024/09/ICDS_Report_Japan_NATO_and_the_Diversification_of_Security_Partnerships_Atanassova_Cornelis_Matsuda_Gaens_Loorents_September_2024.pdf

Belhaj, F. (2024). *Policy brief No. 62/24*. Policy Center for the New South. https://www.policycenter.ma/sites/default/files/2024-11/PB_62-24_Ferid%20Belhaj.pdf

Blackwill, R. D., & Campbell, K. M. (2016). Xi Jinping on the Global Stage. *Council on Foreign Relations*, 74, 1–67. https://cdn.cfr.org/sites/default/files/pdf/2016/02/CSR74_Blackwill_Campbell_Xi_Jinping.pdf

Boylan, B. M., McBeath, J., & Wang, B. (2021). US–China Relations: Nationalism, the Trade War, and COVID-19. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 14(1), 23–40. <https://doi.org/10.1007/s40647-020-00302-6>

Bradsher, K. (2025, April 9). *China Raises Retaliatory Tariff on U.S. Goods to 84% after Trump Latest Levies*. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2025/04/09/business/economy/china-tariffs-us-trump.html>

Brannon, V. C., & Carey, M. P. (2024, September 5). *The Congressional Review Act: Frequently Asked Questions* (R43992). Congressional Research Service.

<https://www.congress.gov/crs-product/R43992>

Center for Presidential Transition. (2024, November 16). *Presidential transitions are a perilous moment for national security*. Partnership for Public Service. <https://presidentialtransition.org/reports-publications/presidential-transitions-are-a-perilous-moment-for-national-security/>

Chu, F., Sridhar, M., Mundra, N., Arora, S., Nuq, A., & Melnikov, S. (2024, September 5). *Diversifying global supply chains: Opportunities in Southeast Asia*. McKinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/industries/logistics/our-insights/diversifying-global-supply-chains-opportunities-in-southeast-asia>

Chivvis, C. S., Cuéllar, M.-F. (T.), Medeiros, E. S., Walt, S., Culver, J., Foot, R., Bergsten, C. F., Campanella, E., Rithmire, M., Fravel, M. T., Heginbotham, E., Perkovich, G., Wong, A., & Wertheim, S. (2024, Oktober 17). *U.S.-China Relations for the 2030s: Toward a Realistic Scenario for Coexistence*. Carnegie Endowment for International Peace. <https://carnegieendowment.org/research/2024/10/us-china-relations-for-the-2030s-toward-a-realistic-scenario-for-coexistence?lang=en>

Congressional Research Service. (2024, Oktober 22). *The Congressional Review Act: Determining Which “Rules” Must Be Submitted to Congress* (R45248). <https://crsreports.congress.gov/product/details?prodcode=R45248>

Committee for a Responsible Federal Budget. (2024, April 10). *Donald Trump's 60% tariff on Chinese imports*. <https://www.crfb.org/blogs/donald-trumps-60-tariff-chinese-imports>

Council on Foreign Relations. (2025, April 4). *The contentious U.S.-China trade relationship*. <https://www.cfr.org/backgrounder/contentious-us-china-trade-relationship>

Chen, Y. C & Huang, F. (2025, March 20). *Trump against any change of Taiwan's status quo by force: Rubio*. Focus Taiwan. <https://focustaiwan.tw/politics/202503200007>

Hay, S. (2024, Februari 13). *A lookback at the law: How Congress uses the CRA*. GW Regulatory Studies Center. https://regulatorystudies.columbian.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs4751/files/2024-02/cra_descriptive_shay_feb2024.pdf

Hass, R. (2021). The “new normal” in US-China relations: Hardening competition and deep interdependence. In *Brookings* (Vol. 92, Issue 2). <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/08/12/the-new-normal-in-us-china-relations-hardening-competition-and-deep-interdependence/>

Hawkins, M & Leonard, J. (2025, May 30). *US Plans Wider China Tech Sanctions With Subsidiary Crackdown*. Bloomberg. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-30/us-plans-wider-china-tech-sanctions-with-subsidiary-crackdown>

Hermann, C. F. (1990). Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy. *International Studies Quarterly*, 34(1), 3. <https://doi.org/10.2307/2600403>

Hay, S. (2025, Mei 9). *First 100 Days: Deregulation Through Novel Uses of Old Tools*. Regulatory Studies Center, The George Washington University. <https://regulatorystudies.columbian.gwu.edu/first-100-days-deregulation-through-novel-uses-old-tools>

Hass, R. (2021, August 12). *The new normal in U.S.-China relations: Hardening competition and deep interdependence*. Brookings Institution. <https://www.brookings.edu/articles/the-new-normal-in-us-china-relations-hardening-competition-and-deep-interdependence/>

Hogue, A. (2025, May 28). *China flexes military muscle with East Asian naval activity, sources say*. Reuters. <https://www.reuters.com/world/china/china-flexes-military-muscle-with-east-asian-naval-activity-sources-say-2025-05-28/>

Huld, A. (2025, April 9). *Trump raises tariffs on China to 54%: Overview and trade implications*. China Briefing. <https://www.china-briefing.com/news/trump-raises-tariffs-on-china-to-54-overview-and-trade-implications/>

Ho, S., Kyaw Kyee, K. K., Velasco, J. C., Chandarith, N., Sawasdipakdi, P., Ngeow, C. B.,

Le, H. H., Kittikhoun, A., & Rezasyah, T. (2025, April 15). *A second Trump term: Will Southeast Asia tilt toward China?* Carnegie Endowment for International Peace. <https://carnegieendowment.org/posts/2025/04/a-second-trump-term-will-southeast-asia-tilt-toward-china>

International Crisis Group. (2025, May). *Asia in flux: Strategic competition and regional order* (Asia Report No. 347). <https://www.crisisgroup.org/sites/default/files/2025-05/347-asia-in-flux.pdf>

Jarmuth, A. (2018). *Made in China 2025 - Modernizing China's Industrial Capability*. In *Institute for Security and Development Policy*. <https://isdpeu/publication/made-china-2025/>

Jones, C. M. (2010). *Bureaucratic Politics and Organizational Process Models*. *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*, October, 1–26. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.2>

Johnstone, C. B. (2024, Maret 21). *Countering China's military strategy: The role of U.S. allies and partners* [Testimoni tertulis]. Center for Strategic and International Studies. https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2024-03/ts240321_Christopher_Johnstone.pdf

Kane, T, Schrag, E & Patnaik S. (2024, December 11). *What will deregulation look like under the second Trump administration?* Brookings Institution. <https://www.brookings.edu/articles/what-will-deregulation-look-like-under-the-second-trump-administration/>

Liu, Z. Z, Tobin L & Waterman, J. (2025, March 31). *Transition 2025 Series: The future of U.S.-China relations*. Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/event/transition-2025-series-future-us-china-relations>

Lu, C., & Zhang, L. (2021). *Managing U.S.-China Technological Decoupling*. *China Quarterly of International Strategic Studies*, 7(4), 409–431. <https://doi.org/10.1142/S2377740021500172>

Leu, G.-Y. (2025, May 8). *Trump's tariffs 2.0: New effects and implications to Taiwan*. Taiwan Insight. <https://taiwaninsight.org/2025/05/08/trumps-tariffs-2-0-new-effects-and-implications-to-taiwan/>

Lindsay, J. M. (2025, April 29). *The first 100 days: Trump's foreign policy—Disruption is just beginning*. Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/article/first-100-days-trumps-foreign-policy-disruption-just-beginning>

Patrick, S. (2023). *Four Contending U.S. Approaches to Multilateralism*. *Carnegie Endowment for International Peace, January*. <https://carnegieendowment.org/2023/01/23/four-contending-u.s.-approaches-to-multilateralism-pub-88852>

Pew Research Center. (2014, Juni 12). *Political polarization in the American public*. <https://www.pewresearch.org/politics/2014/06/12/political-polarization-in-the-american-public/>

Saul, S. (2025, 29 March). *Trump Intends to Cancel All Federal Funds Directed at Harvard*. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2025/05/27/us/harvard-trump-federal-funds.html>

Sullivan, J., & Campbell, K. (2019, August 1). *Competition with China must not end in catastrophe*. *Foreign Affairs*. <https://www.foreignaffairs.com/china/competition-with-china-catastrophe-sullivan-campbell>

Swanson, A., Austen, I., & Romero, S. (2025, Maret 4). *Trump's tariffs on Canada, Mexico and China snap into effect*. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2025/03/04/us/politics/trump-trade-war-economy.html>

The New York Times. (2025, Marc 4). *Presidential election results: 2025*. <https://www.nytimes.com/interactive/2024/11/05/us/elections/results-president.html>

Teo, S. (2024, December 27). *The rise and endurance of minilateralism in the Indo-Pacific*. *Lowy Institute*. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/rise-endurance-minilateralism-indo-pacific>

Teekah, E. (2025, May 29). *U.S. China Trade War*. *Encyclopaedia Britannica*.

<https://www.britannica.com/money/US-China-trade-war>

The White House. (2025, April 2). *Fact sheet: President Donald J. Trump declares national emergency to increase our competitive edge, protect our sovereignty, and strengthen our national and economic security*. [https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/04/fact-sheet-president-donald-j-trump-declares-national-emergency-to-increase-our-competitive-edge-protect-our-sovereignty ... /](https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/04/fact-sheet-president-donald-j-trump-declares-national-emergency-to-increase-our-competitive-edge-protect-our-sovereignty.../)

United States Trade Representative. (2025). *2025 Trade Policy Agenda and 2024 Annual Report of the President of the United States on the Trade Agreements Program*. <https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2025/2025%20Trade%20Policy%20Agenda%20WTO%20at%2030%20and%202024%20Annual%20Report%2002282025%20--%20FINAL.pdf>

U.S. Department of Defense. (2020, June). *Defense space strategy summary* [Government report]. https://media.defense.gov/2020/Jun/17/2002317391/-1/-1/1/2020_defense_space_strategy_summary.pdf

World Trade Organization. (2025, April 16). *Temporary tariff pause mitigates trade contraction, but strong headwinds persist*. https://www.wto.org/english/news_e/news25_e/tfore_16apr25_e.htm